

Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Opini Audit Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Se-Sumatera

Afifah Huriyah^{1*}, Indra Satriawan², Kurnia Widya Oktarini³

^{1,2,3} Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya, Indonesia

* E-mail: afifahfia123@gmail.com

Information Article

History Article

Submission: 10-06-2026

Revision: 17-07-2026

Published: 18-07-2026

DOI Article:

10.62421/jibema.v4i1.562

ABSTRAK

Salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah diwujudkan melalui penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Opini audit terdiri atas Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Perolehan opini WTP menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sehingga menjadi salah satu indikator keberhasilan pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor memengaruhi opini audit atas laporan keuangan pemerintah kota se-sumatera. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Objek penelitian mencakup 34 pemerintah kota se-Sumatera selama periode 2020-2024, sehingga diperoleh 170 observasi dengan metode sampel jenuh. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan analisis regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa umur pemerintah daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap opini audit. Sebaliknya, kelemahan sistem pengendalian intern dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit. Secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap opini audit atas laporan keuangan pemerintah kota se-Sumatera.

Kata Kunci: Umur Pemerintah Daerah, Kelemahan Sistem Pengendalian Intern, Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, Opini Audit

ABSTRACT

One form of regional government accountability is realized through the preparation of Regional Government Financial Reports (LKPD), which are prepared in accordance with Government Accounting Standards (SAP). Audit opinions include Unqualified Opinion (WTP), Qualified Opinion (WDP), Adverse Opinion (TW), and Disclaimer of Opinion (TMP). Obtaining an Unqualified Opinion indicates that the financial statements have been presented fairly in all material respects, thus becoming an indicator of the success of regional financial management. This study aims to examine the factors affecting audit opinions on the financial statement of municipal governments across Sumatra. A quantitative approach was employed using secondary data obtained from the Audit Reports issued

Acknowledgment

by the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI). The study covered 34 municipal governments in Sumatra during the 2020-2024 period, resulting in 170 observations selected through a saturated sampling technique. The hypotheses were tested using logistic regression analysis. The results indicate that the age of local governments has a significant negative effect on audit opinions. In contrast, internal control system weaknesses and the follow-up of audit recommendations have no significant effect on audit opinions. However, the three variables collectively have a significant effect on audit opinions on the financial statements of municipal governments across Sumatra.

Key word: *Age of local government, Internal control system weaknesses, Follow-up of audit recommendations*

©2026 Published by JIBEMA. Selection and/or peer-review under responsibility of JIBEMA

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan keuangan secara mandiri dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsekuensi dari kewenangan tersebut adalah meningkatnya tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah diwujudkan melalui penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan yang berkualitas menjadi instrumen penting dalam menyediakan informasi yang andal bagi masyarakat dan pemangku kepentingan mengenai penggunaan anggaran daerah (Mursalin & Khaeriyah, 2025).

Sebagai lembaga pemeriksa eksternal negara, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) bertugas melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, termasuk pemerintah daerah. Hasil pemeriksaan tersebut dinyatakan dalam bentuk opini audit yang mencerminkan tingkat kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern. Opini audit terdiri atas Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Perolehan opini WTP menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sehingga menjadi salah satu indikator keberhasilan pengelolaan keuangan daerah (Apriani et al., 2024).

Pemerintah kota se-Sumatera memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional sehingga dituntut menyelenggarakan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Berdasar-

kan ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) BPK RI periode 2020-2024, mayoritas pemerintah kota telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun, masih terdapat beberapa pemerintah kota yang memperoleh opini Wajar Dalam Pengecualian (WDP), bahkan mengalami perubahan opini pada periode tertentu. Selain itu, belum ada satu tahun anggaran yang menunjukkan seluruh pemerintah kota se-Sumatera memperoleh opini WTP secara bersamaan (BPK RI, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah kota se-Sumatera masih berfluktuasi.

Tabel 1. Daftar Opini dan Jumlah Kelemahan SPI 34 Kota se-Sumatera

No.	Kota	2020		2021		2022		2023		2024	
		Opini	SPI	Opini	SPI	Opini	SPI	Opini	SPI	Opini	SPI
1	Banda Aceh	WTP	13	WTP	15	WTP	25	WTP	19	WTP	21
2	Langsa	WTP	6	WTP	12	WTP	12	WTP	10	WTP	11
3	Lhokseumawe	WTP	19	WTP	10	WTP	10	WTP	9	WTP	9
4	Sabang	WTP	11	WTP	7	WTP	10	WTP	10	WTP	7
5	Subulussalam	WTP	8	WTP	16	WTP	15	WTP	9	WTP	14
6	Binjai	WTP	4	WTP	3	WDP	7	WTP	11	WTP	9
7	Gunungsitoli	WTP	3	WTP	2	WTP	3	WTP	6	WTP	5
8	Medan	WTP	13	WTP	9	WTP	12	WTP	9	WTP	19
9	Padang Sidempuan	WTP	5	WTP	4	WTP	1	WTP	7	WTP	16
10	Pematangsiantar	WDP	5	WTP	5	WTP	7	WTP	9	WTP	6
11	Sibolga	WTP	9	WTP	2	WTP	1	WDP	4	WDP	8
12	Tanjungbalai	WDP	10	WDP	7	WDP	16	WTP	11	WTP	9
13	Tebing Tinggi	WTP	8	WTP	3	WTP	3	WTP	6	WTP	6
14	Bukittinggi	WTP	1	WTP	11	WTP	8	WTP	8	WTP	13
15	Padang	WTP	10	WTP	16	WTP	16	WTP	24	WTP	13
16	Padang Panjang	WTP	13	WTP	8	WTP	9	WTP	8	WTP	4
17	Pariaman	WTP	16	WTP	9	WTP	22	WTP	18	WTP	8
18	Payakumbuh	WTP	3	WTP	12	WTP	5	WTP	4	WTP	8
19	Sawahlunto	WTP	16	WTP	10	WTP	7	WTP	6	WTP	10
20	Solok	WTP	19	WTP	11	WTP	14	WTP	8	WTP	8
21	Dumai	WTP	3	WTP	8	WTP	9	WTP	9	WTP	13
22	Pekanbaru	WTP	14	WTP	7	WTP	19	WTP	13	WDP	16
23	Jambi	WTP	14	WTP	16	WTP	18	WTP	12	WTP	14
24	Sungai Penuh	WTP	6	WTP	12	WTP	14	WTP	10	WTP	1
25	Lubuklinggau	WTP	4	WTP	5	WTP	11	WTP	21	WTP	7
26	Pagar Alam	WTP	4	WTP	5	WDP	6	WTP	12	WTP	7
27	Palembang	WTP	15	WTP	6	WDP	12	WTP	16	WTP	16
28	Prabumulih	WTP	9	WTP	9	WTP	17	WTP	9	WTP	13
29	Bengkulu	WTP	12	WTP	29	WTP	21	WTP	16	WTP	12
30	Bandar Lampung	WDP	8	WDP	22	WDP	13	WTP	18	WTP	13
31	Metro	WTP	5	WTP	7	WTP	12	WTP	16	WTP	14
32	Butam	WTP	7	WTP	10	WTP	11	WTP	22	WTP	3
33	Tanjungpinang	WTP	10	WTP	11	WTP	5	WTP	7	WTP	9
34	Pangkalpinang	WTP	19	WTP	5	WTP	10	WTP	4	WTP	8

Sumber : BPK-RI IHPS I Tahun 2026

Berdasarkan Tabel 1, meskipun opini WTP Mendominasi, perolehan opini tersebut belum tentu mencerminkan bahwa tata kelola keuangan daerah telah sepenuhnya terbebas dari permasalahan. Beberapa pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP masih memiliki temuan kelemahan sistem pengendalian intern yang jauh lebih banyak daripada pemerintah daerah yang memperoleh opini WDP. Bahkan, Pemerintah Kota Palembang yang berhasil mempertahankan opini WTP beberapa tahun berturut-turut tetap menghadapi kasus dugaan korupsi revitalisasi Pasar Cinde (Kejaksaan RI, 2026). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa opini audit dipengaruhi oleh berbagai faktor yang perlu dikaji

lebih lanjut, tidak hanya berdasarkan hasil akhir pemeriksaan, tetapi juga karakteristik pemerintah daerah dan tindak lanjut atas rekomendasi auditor.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis pengaruh umur pemerintah daerah, kelemahan sistem pengendalian intern, dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap opini audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada pemerintah kota se-Sumatera periode 2020-2024. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang diakses melalui laman resmi www.bpk.go.id. Populasi penelitian terdiri atas 34 pemerintah kota di wilayah se-Sumatera. Penentuan sampel menggunakan teknik sampel jenuh sehingga seluruh anggota populasi dijadikan sampel penelitian. Dengan periode pengamatan selama lima tahun, yaitu 2020-2024, jumlah observasi yang dianalisis sebanyak 170.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah opini audit atas LKPD yang diukur menggunakan variabel dummy (Ghozali, 2021), yaitu nilai 1 untuk pemerintah kota yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan nilai 0 untuk pemerintah kota yang memperoleh opini Wajar Dalam Pengecualian (WDP). Variabel independen meliputi umur pemerintah daerah, kelemahan sistem pengendalian intern, dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Umur pemerintah daerah diukur berdasarkan selisih antara tahun penelitian dengan tahun pembentukan pemerintah daerah (Setyaningrum & Syafitri, 2012). Kelemahan sistem pengendalian intern diukur berdasarkan jumlah temuan kelemahan SPI yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK (Mutiara et al., 2022). Sementara itu, tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan diukur berdasarkan persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan sebagaimana dilaporkan dalam IHPS BPK RI (Amyulianthy et al., 2020).

Analisis data dilakukan menggunakan regresi logistik biner (*binary logistic regression*) dengan alat SPSS versi 29 karena variabel dependen berupa opini audit yang diukur menggunakan variabel dummy (WTP = 1 dan WDP = 0). Sebelum pengujian hipotesis, dilakukan analisis statistik deskriptif untuk memberikan gambaran karakteristik data penelitian. Selanjutnya, pengujian model dilakukan melalui *Hosmer and Lemeshow Test*, *Overall Model Fit* yang dilihat dari nilai *-2 Log Likelihood*, serta *koefisien determinasi menggunakan Nagelkerke R Square*. Pengujian pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dilakukan secara simultan menggunakan *Omnibus Test of Model Coefficients* dan secara parsial menggunakan *Wald Test*. Besarnya peluang pengaruh masing-masing variabel independen terhadap opini audit diinterpretasikan menggunakan nilai *odds ratio*.

Hipotesis

- H₁: Umur pemerintah daerah berpengaruh terhadap opini audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- H₂: Kelemahan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap opini audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- H₃: Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan berpengaruh terhadap opini audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

HASIL

Statistik Deskriptif

Tabel 2. Hasil Penelitian Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Umur Pemerintah Daerah	170	12	68	45.88	22.323
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	170	1	29	10.34	5.328
Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	170	17.50	100.00	68.5355	17.66588
Opini Audit	170	0	1	.92	.267
Valid N (listwise)	170				

Sumber: Hasil Output SPSS, 2026

Berdasarkan Tabel 2, variabel Umur Pemerintah Daerah memiliki rata-rata sebesar 45.88 tahun dengan rentang nilai 12 hingga 68 tahun, yang menunjukkan variasi umur pemerintah kota se-Sumatera cukup beragam. Variabel Kelemahan Sistem Pengendalian Intern memiliki rata-rata 10.34 temuan dengan rentang 1 hingga 29 temuan. Sementara itu, Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan memiliki rata-rata sebesar 68.54% dengan nilai minimum 17.50% dan maksimum 100.00%, yang mengindikasikan adanya perbedaan tingkat penyelesaian rekomendasi antar pemerintah daerah. Adapun variabel Opini Audit memiliki rata-rata sebesar 0.92, yang menunjukkan bahwa mayoritas pemerintah kota dalam sampel memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama periode penelitian.

Menilai Keseluruhan Model (*Overall Model Fit*)

Tabel 3. Iteration History (Awal)

Iteration		-2 Log likelihood	Coefficients Constant
Step 0	1	101.404	1.694
	2	92.312	2.295
	3	91.824	2.476
	4	91.822	2.491
	5	91.822	2.491

Sumber: Hasil Output SPSS, 2026

Tabel 4 Iteration History (Akhir)

			Coefficients			
				Umur Pemerintah	Kelemahan Sistem Pengendalian	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
Iteration		-2 Log likelihood	Constant	Daerah	Intern	
Step 1	1	98.490	2.077	-.010	.006	.000
	2	86.080	3.307	-.024	.012	.000
	3	83.749	4.343	-.039	.017	.000
	4	83.424	4.950	-.048	.017	.000
	5	83.411	5.105	-.051	.017	.000
	6	83.411	5.113	-.051	.017	.000
	7	83.411	5.113	-.051	.017	.000

Sumber: Hasil Output SPSS, 2026

Penilaian keseluruhan model dilakukan dengan membandingkan nilai *-2 Log Likelihood* pada model awal (Block 0) dan model akhir (Block 1). Nilai *-2 Log Likelihood* mengalami penurunan dari 91.822 menjadi 83.411 setelah variabel independen dimasukkan ke dalam model. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa model regresi logistik yang dibangun memiliki kecocokan yang lebih baik dalam menjelaskan opini audit.

Menguji Kelayakan Model Regresi (*Goodness of Fit Test*)

Tabel 5. Hasil Uji Hosmer and Lemeshow's Goodness

Step	Chi-square	df	Sig.
1	4.966	8	.761

Sumber: Hasil Output SPSS, 2026

Berdasarkan tabel 5, menunjukkan bahwa nilai signifikansi (*Sig.*) sebesar 0.414 yang mana nilai ≥ 0.05 , maka hipotesis nol (H_0) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara model regresi dan data aktual, sehingga model dinilai layak untuk digunakan dalam memprediksi nilai observasi dan dapat dilanjutkan ke tahap pengujian hipotesis.

Koefisien Determinasi (*Nagelkerke R Square*)

Tabel 6. Hasil Koefisien Determinasi

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	83.411 ^a	.048	.116

Sumber: Hasil Output SPSS, 2026

pada tabel 6 hasil nilai *Nagelkerke R Square* sebesar 0.116. hasil ini menunjukkan bahwasanya sebesar 11.6% variasi variabel dependen (Opini audit atas LKPD) dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun sisanya, yaitu sebesar 88.4% dijelaskan oleh faktor lain di luar model.

Matriks Klasifikasi

Tabel 7. Hasil Matriks Klasifikasi

			Predicted		
			Opini Audit	WTP	Percentage Correct
Step 0	Observed	NON WTP	0	13	.0
	Opini Audit	WTP	0	157	100.0
	Overall Percentage				92.4

Sumber: Hasil Output SPSS, 2026

Secara keseluruhan *Overall Percentage* (persentase akurasi keseluruhan) dari model adalah 92.4%. ini menunjukkan bahwa model secara umum memiliki tingkat akurasi yang tinggi atau mampu mengklasifikasikan observasi objek penelitian dengan benar karena mendekati tingkatan ketepatan hampir 100%.

Tabel 8. Hasil Uji Analisis Regresi Logistik

Variabel	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Umur Pemerintah Daerah	-0.051	0.023	4.904	1	0.027	0.951
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	0.017	0.056	0.093	1	0.760	1.017
Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	0.000	0.017	0.001	1	0.979	1.000
Constant	5.113	1.984	6.642	1	0.010	166.162

Sumber: Hasil SPSS 29, 2026

Berdasarkan hasil uji regresi logistic pada tabel 8, maka diperoleh persamaan model regresi logistik sebagai berikut:

$$\text{LN} \frac{P}{1-P} = 5.113 - 0.051 X_1 + 0.017 X_2 + 0.000 X_3$$

Berdasarkan Tabel 8, variabel Umur Pemerintah Daerah memiliki koefisien negatif $\beta = -0,051$; $\text{Exp}(B) = 0,951$), yang menunjukkan bahwa peningkatan umur pemerintah daerah menurunkan peluang memperoleh opini WTP sebesar 4.9%. sebaliknya, Kelemahan Sistem Pengendalian Intern memiliki koefisien positif ($\beta = 0,017$; $\text{Exp}(B) = 1,017$), sedangkan Tindak Lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan juga menunjukkan arah positif ($\beta = 0,000$; $\text{Exp}(B) = 1,000$), namun peningkatan variabel tersebut tidak memberikan perubahan peluang memperoleh opini WTP.

PEMBAHASAN

Hasil Uji Parsial (*Wald*)

Tabel 9. Hasil Uji Parsial (*Wald*)

Step	Variabel	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1a	Umur Pemerintah Daerah	-0.051	0.023	4.904	1	0.027	0.951
	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	0.017	0.056	0.093	1	0.760	1.017
	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	0.000	0.017	0.001	1	0.979	1.000

Step	Variabel	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
	Constant	5.113	1.984	6.642	1	0.010	166.162

Sumber: Hasil SPSS 29, 2026

Pengaruh Umur Pemerintah Daerah secara Parsial Terhadap Opini Audit

Berdasarkan hasil uji Wald pada Tabel 9, variabel Umur Pemerintah Daerah berpengaruh negative dan signifikan terhadap opini audit atas LKPD pemerintah kota se-Sumatera sehingga hipotesis pertama diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin lama suatu pemerintah daerah berdiri, peluang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) cenderung menurun. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pengalaman organisasi yang lebih Panjang tidak selalu diikuti oleh peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Seiring bertambahnya usia pemerintah daerah, kompleksitas organisasi, pengelolaan aset, dan aktivitas keuangan juga semakin meningkat sehingga Risiko kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan menjadi lebih besar. Temuan ini sejalan dengan teori keagenan yang dikemukakan oleh (Jensen & Meckling, 1976), yang menjelaskan bahwa semakin kompleks hubungan antara *principal* dan *agent*, semakin besar tantangan dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Hasil penelitian ini berbeda dengan (Wicaksono et al., 2013) yang menemukan umur pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap opini audit, serta tidak sejalan dengan (Rosadi & Okfitasari, 2019) maupun (Irman & Suryati, 2017) yang menyatakan bahwa umur pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap opini audit. temuan ini mengindikasikan bahwa umur pemerintah daerah bukan satu-satunya faktor yang menentukan opini audit, melainkan dipengaruhi pula oleh kualitas tata Kelola dan pengelolaan keuangan daerah

Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Intern secara Parsial terhadap Opini Audit

Berdasarkan hasil uji Wald, variabel kelemahan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit atas LKPD pemerintah kota se-Sumatera, sehingga hipotesis kedua ditolak. Temuan ini menunjukkan bahwa banyak kelemahan sistem pengendalian intern yang ditemukan BPK tidak secara langsung memengaruhi opini audit yang diterima pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Mutiar et al., 2022) serta (Fariah & Nendi, 2020) yang menyatakan bahwa kelemahan sistem penegndalian intern tidak berpengaruh terhadap opini audit. sebaliknya, hasil berbeda dengan (Fitria Kamilah et al., 2024), (Zulhaerini et al., 2025), dan (Irman & Suryati, 2017) yang menemukan adanya pengaruh signifikan. Perbedaan tersebut diduga disebabkan oleh perbedaan periode penelitian, karakteristik sampel, serta pengukuran kelemahan sistem pengendalian intern yang digunakan. Temuan ini dapat dijelaskan melalui teori keagenan (Jensen & Meckling, 1976) yang memandang sistem pengendalian intern sebagai mekanisme untuk mengurangi asimetri informasi antara pemerintah daerah sebagai *agent* dan Masyarakat sebagai *principal*. Namun, kelemahan sistem

pengendalian intern tidak selalu menyebabkan laporan keuangan menjadi tidak wajar. Hal ini juga tercermin pada data penelitian, di mana beberapa pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP tetap memiliki jumlah temuan kelemahan SPI yang relatif tinggi. Sesuai Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, opini audit ditentukan berdasarkan kewajaran penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kelemahan SPI yang tidak berdampak material terhadap laporan keuangan belum tentu memengaruhi opini audit yang diberikan oleh BPK

Pengaruh Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan secara parsial terhadap Opini Audit

Berdasarkan hasil uji Wald, variabel Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Opini Audit atas LKPD di Kota Se-Sumatera sehingga hipotesis ketiga ditolak. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian dari (Mutiarra et al., 2022), (Valentina, 2022), dan (Kusmiati & Purwasih, 2024) yang menyatakan bahwa Tindak Lanjut Rekomendasi tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Opini Audit atas LKPD Kota Se-Sumatera. Namun, hasil berbeda dari (Ultra Meza et al., 2023), (Salsabila & Wahyudi, 2022), dan (Fitria Kamilah et al., 2024) yang menyatakan bahwa Tindak Lanjut Rekomendasi memberikan pengaruh signifikan terhadap Opini Audit. Perbedaan tersebut mengindikasikan bahwa auditor tidak hanya mempertimbangkan tingkat penyelesaian rekomendasi, tetapi juga materialitas temuan serta kewajaran penyajian laporan keuangan pada periode berjalan. Hasil ini didukung oleh data dari Kota Tanjung Pinang pada tahun 2020 yang memperoleh persentase 97.22% dalam menindaklanjuti rekomendasi dari BPK pada periode sebelumnya. Namun, kota tersebut memperoleh opini Wajar Dalam Pengecualian (WDP). sedangkan, pada kota Binjai tahun 2024 memperoleh persentase penyelesaian tindak lanjut yang lebih rendah dari pada Kota Tanjung Pinang tetapi memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kondisi ini mengindikasikan bahwa penyelesaian rekomendasi secara administrative belum tentu mencerminkan perbaikan menyeluruh atas permasalahan pengelolaan keuangan. Hal ini sejalan dengan teori keagenan (Jensen & Meckling, 1976) dan ketentuan Undang-undang Nomor 15 TAHUN 2004 yang menegaskan bahwa opini audit ditentukan berdasarkan kewajaran laporan keuangan, efektivitas sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kecukupan pengungkapan

Hasil Uji Simultan (*Omnibus Test Of Model Coefficients*)

Tabel 1 Hasil Uji Simultan
Omnibus Tests of Model Coefficients

		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	9.165	3	.027
	Block	9.165	3	.027
	Model	9.165	3	.027

Sumber: Hasil SPSS 29, 2026

Hasil Uji *Omnibus Test* menunjukkan bahwa Umur Pemerintah Daerah, Kelemahan Sistem Pengendalian Intern, dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Opini Audit atas LKPD di Kota Se-Sumatera, sehingga hipotesis keempat diterima. Diketahui bahwa nilai koefisien determinasi yang ditunjukkan oleh Nagelkerke R Square adalah sebesar 0.116, hal ini menunjukkan bahwa variabel independent, yaitu Umur Pemerintah Daerah, Kelemahan Sistem Pengendalian Intern, dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan hanya mampu menjelaskan 11.6% variasi dalam opini audit. sementara, sisanya sebesar 88.4%, dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar cakupan model penelitian ini. Temuan ini menunjukkan bahwa opini audit dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa umur pemerintah daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap opini audit, sedangkan kelemahan sistem pengendalian intern dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tidak berpengaruh signifikan. Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap opini audit atas LKPD pemerintah kota se-Sumatera. Pemerintah daerah diharapkan terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan sistem pengendalian intern, sedangkan penelitian selanjutnya disarankan menambah variabel lain serta memperluas cakupan penelitian untuk memperoleh model yang lebih komprehensif

DAFTAR PUSTAKA

- Amyulianthy, R., Anto, A. S. U., & Budi, S. (2020). *Temuan Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Opini Audit*.
- Apriani, R., Yulsiati, H., Aryani, Y. A., Akuntansi, J., Sriwijaya, N., Dvi, S., & Publik, A. S. (2024). *Value Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Bisnis Daerah Provinsi Se-Indonesia*. www.bpk.go.id.
- BPK RI. (2025). *IHPS 1 2025*.
- Fariah, A., & Nendi, I. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan (Bpk) Kota Cirebon Jawa Barat. In *Jurnal Sosial Teknik* (Vol. 2, Number 2).
- Fitria Kamilah, N., Zakaria, A., & Mulyasari, I. (2024). dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan terhadap Opini Audit BPK. In *Pengaruh SPI* (Vol. 4, Number 1). <http://bpk.go.id>
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Anal Isis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26 IBM" SPSS" Statistics »*.
- Irman, M., & Suryati. (2017). *The Influence Of Internal Control System Weaknesses, Incompliance Towards Laws And Regulations, The Previous Year's Audit Opinion And The Age Of The Local Government Against Acceptance Of An Audit Opinion In The Local Goverment/Riau Province In*

2011-2014.

Jensen & Meckling. (1976). *Teori Jensen meckling* .

Kejaksaan RI. (2026). Kejati Sumsel Terima Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Rp750 Juta dalam Perkara Korupsi Pasar Cinde.

Kusmiati, & Purwasih, D. (2024). *Jurnal+Prodi+Akutansi+Unpam_Kusmiati*.
<https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jakbs/article/view/1712/1579>

Mursalin, & Khaeriyah. (2025). Accountability and Transparency in Regional Budget Management for Good Governance. *International Journal of Economics, Commerce, and Management*, 2(4), 140–148. <https://doi.org/10.62951/ijecm.v2i4.991>

Mutiara, R., Masnila, N., & Nurhasanah, N. (2022). Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Intern, Ketidakpatuhan pada Perundang-Undangan dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Terhadap Opini Audit Pemerintah Daerah. *Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknologi*, 4(2), 94–110. <https://doi.org/10.46799/jequi.v4i2.99>

Rosadi, S., & Okfitasari, A. (2019). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan terhadap Opini Audit BPK. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 19(2), 148. <https://doi.org/10.29040/jap.v19i2.326>

Salsabila, R., & Wahyudi, I. (2022). Pengaruh Temuan Audit, Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, Dan Ukuran Pemerintahan Daerah Terhadap Opini Audit Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia.

Setyaningrum, D., & Syafitri, F. (2012). Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 9(2), 154–170. <https://doi.org/10.21002/jaki.2012.10>

Ultra Meza, K., Martini, R., Armaini, R., Akuntansi, J., & Sriwijaya, P. N. (2023). Determinan Opini Audit Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Sumatera. www.bpk.go.id.

Valentina, J. V. (2022). Pengaruh Temuan SPI, Temuan Kepatuhan, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Penyelesaian Kerugian Daerah Terhadap Opini Audit di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. *Syntax Idea*, 3(6), 951. <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v4i06.1867>

Wicaksono, P. T., Setyaningrum, D., & Martini, D. (2013). *Audit Opinion And Audit Finding's Determinants Of Indonesia's Supreme Audit Institution*.

Zulhaerini, A., Din, M., Jurana, J., & Mustamin, M. (2025). *The Impact Of Audit Findings And Follow-Up On Recommendations On Audit Opinion: A Study Of Local Governments In Districts/Cities In Central Sulawesi Province*.